

ABSTRAK

Implementasi Aplikasi SIKS-NG Dalam Layanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Di Kabupaten Bengkulu Selatan

Oleh : Jeri Andika Putra

2263201030

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam layanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman serta teori implementasi George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIKS-NG telah berjalan cukup baik dalam mendukung pengelolaan DTSEN. Komunikasi antar pelaksana berlangsung efektif, sumber daya manusia cukup memadai meskipun masih terdapat keterbatasan sarana dan jaringan internet, pelaksana memiliki komitmen yang baik, serta struktur birokrasi telah didukung oleh SOP dan pembagian tugas yang jelas. Namun, peningkatan kompetensi SDM, penyediaan fasilitas pendukung, dan pemutakhiran data secara berkelanjutan masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.

Kata Kunci: Implementasi, SIKS-NG, DTSEN, E-Government, Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE SIKS-NG APPLICATION IN THE NATIONAL SINGLE SOCIAL AND ECONOMIC DATA SERVICES IN SOUTH BENGKULU REGENCY

By: Jeri Andika Putra

2263201030

This study aims to examine the implementation of the Social Welfare Information System Next Generation (SIKS-NG) application in the provision of National Single Social and Economic Data (DTSEN) services in South Bengkulu Regency. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using the Miles and Huberman model and George C. Edward III's policy implementation theory, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results show that the implementation of the SIKS-NG application has been relatively effective in supporting the management of DTSEN, Communication among implementing actors has been effective, human resources are generally adequate despite limitations in facilities and internet connectivity, and implementing personnel demonstrate a strong commitment to carrying out their responsibilities. Furthermore, the bureaucratic structure is supported by standard operating procedures (SOPs) and a clear division of responsibilities. However, improvements in human resource competencies, the provision of supporting facilities, and continuous data updating are still needed to enhance the effectiveness of service delivery.

Keywords: Implementation, SIKS-NG, DTSEN, E-Government, South Bengkulu Regency Social Affairs Office

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada komunikasi dan akses informasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan, termasuk administrasi publik. Bagi instansi pemerintah, teknologi informasi digunakan untuk mengoptimalkan proses administrasi dan, pada saat yang sama, meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat (Safrawati & Siregar, 2022).

Layanan publik yang ditawarkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, negara bagian, kabupaten, kota, atau kecamatan, merupakan cara untuk melaksanakan fungsi aparatur negara dalam melayani masyarakat. Seiring dengan implementasi otonomi daerah, peningkatan kualitas layanan publik telah menjadi prioritas bagi pemerintah daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja administrasi publik. Salah satu strategi yang dapat berkontribusi pada peningkatan ini adalah penggunaan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berbagai proses layanan dan administrasi publik (Safrawati & Siregar, 2022).

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan dikenal sebagai E-Government Choirunnisa et al., (2023). Implementasi E-Government merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi dalam

proses administrasi dan penyampaian layanan kepada masyarakat. Selain mempermudah akses terhadap layanan, implementasi *E-Government* juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pemerintah, sehingga memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Penggunaan E-Government mendukung terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengurangi proses kerja yang tidak efisien dan memperkuat akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan Djabbari et al., (2024). Keberhasilan implementasinya tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi tetapi juga membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat (Malipi et al., 2023).

Dengan tujuan mendorong penggunaan teknologi dalam pemerintahan, pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengembangan Pemerintahan Elektronik. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengembangan sistem pemerintahan elektronik, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing badan. Seiring waktu, E-Government telah diimplementasikan di berbagai sektor pemerintahan, termasuk bantuan sosial, memainkan peran fundamental dalam mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Pemberantasan kemiskinan tetap menjadi prioritas pembangunan di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik, (2022), proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia akan mencapai 23,36 juta jiwa, atau sekitar 8,25% dari total penduduk Badan Pusat Statistik, (2025). Situasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi di mana kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup bermartabat, berkembang, dan memenuhi fungsi sosial mereka.

Dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, ketersediaan data yang akurat merupakan unsur penting. Data digunakan sebagai dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial, memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, proses pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pembaruan data perlu dilakukan secara terus menerus untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan tetap relevan dengan kondisi masyarakat. Bantuan sosial, sebagai bentuk intervensi pemerintah, diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat tetapi juga mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial secara lebih efektif (Mursyidah & Arydianti, 2024).

Sebagai bagian dari upaya memerangi kemiskinan, pemerintah menerapkan program pengumpulan data penduduk miskin untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada penerima yang tepat. Pelaksanaan program ini didasarkan pada

Sistem Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Bantuan kepada Kaum Miskin. Melalui pengumpulan data yang berkelanjutan, pemerintah berupaya memperoleh informasi yang akurat sebagai dasar untuk penyusunan dan pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menerapkan kebijakan ini berdasarkan Keputusan Nomor 3 Tahun 2021 Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang menetapkan pemberantasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah (Keputusan Nomor 3 Tahun 2021 Kabupaten Bengkulu Selatan). Selanjutnya, pemerintah daerah juga telah menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Teknis Kegiatan Operasional (STOK) Dinas Pelayanan Sosial, sebagai pedoman pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pengelolaan data bantuan sosial.

Sebagai badan pelaksana urusan pemerintahan bantuan sosial, Dinas Pelayanan Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan beberapa program sesuai dengan Rencana Kerja 2024. Program-program tersebut meliputi pembaruan data, verifikasi dan validasi Registri Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan peningkatan kualitas data yang digunakan sebagai dasar penentuan calon penerima bantuan sosial. Akurasi data sangat penting untuk mendukung penyaluran bantuan, memastikan bahwa bantuan tersebut lebih tepat sasaran dan mencerminkan kondisi nyata masyarakat.

Pembaruan data merupakan langkah penting dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota. Ketentuan ini diatur dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kemiskinan, yang memberikan wewenang kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembaruan data di berbagai tingkatan. Lebih lanjut, pasal 1 ayat (2) Peraturan Nomor 5 Menteri Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan dan pembaruan data dalam berbagai format, seperti angka, teks, gambar, dan audio. Hal ini dilakukan melalui berbagai metode, termasuk wawancara, observasi langsung, dan diskusi dengan pemangku kepentingan (Yulfa et al., 2025)

Untuk mendukung proses ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Generasi Berikutnya (SIKS-NG). Aplikasi ini berfungsi sebagai sarana pengelolaan data kesejahteraan sosial, mulai dari pengajuan data baru dan koreksi data yang ada hingga pembaruan data penerima kesejahteraan sosial. Melalui SIKS-NG, Kementerian Sosial mengimplementasikan sistem data terpadu sebagai dasar distribusi kesejahteraan sosial kepada penerima dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dengan tujuan untuk memastikan implementasi yang lebih tepat sasaran.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai integrasi data sosial, Sistem Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) kemudian dikembangkan dan diubah menjadi Sistem Data Sosial Ekonomi Nasional Terpadu (DTSEN). Dalam konteks ini, SIKS-NG berfungsi sebagai sistem informasi yang mendukung pengumpulan,

verifikasi, validasi, dan pembaruan data secara berkelanjutan. Akurasi data sangat penting, karena menjadi dasar penentuan penerima program kesejahteraan sosial. Semakin baik kualitas data yang dikelola, semakin besar peluang program pengentasan kemiskinan untuk diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya (Dhika & Haromin, 2022).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2017 tentang Pembentukan Basis Data Terpadu untuk Program Pengentasan Kemiskinan 2017, pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia berwenang untuk memverifikasi dan memvalidasi data kesejahteraan sosial. Untuk mendukung tugas ini, Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) Kementerian Sosial telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Generasi Berikutnya (SIKS-NG) sebagai sarana untuk memperbarui Basis Data Terpadu (IDB).

Diharapkan penggunaan aplikasi SIKS-NG akan mempercepat proses pengelolaan dan pembaruan data kesejahteraan sosial, memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penyaluran kesejahteraan sosial lebih akurat dan konsisten diperbarui sesuai dengan kondisi lokal. Aplikasi ini juga memudahkan pemerintah daerah untuk mengelola usulan data baru, mengoreksi data, dan melakukan pengecekan dan validasi secara lebih sistematis. Dengan demikian, diharapkan beberapa masalah yang muncul selama ini, seperti perbedaan data dan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, dapat diminimalkan sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat (Dhika & Haromin, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andriani et al., (2023), implementasi aplikasi SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal kapasitas sumber daya. Kendala tersebut meliputi keterbatasan fasilitas pendukung, seperti kurangnya ketersediaan laptop, dan ketidakseimbangan keterampilan teknologi informasi di antara para pelaksana. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia masih diperlukan untuk implementasi *E-Government* yang efektif.

Hasil serupa juga dipaparkan oleh Kurniawan, (2024) dalam penelitiannya tentang implementasi *E-Government* di Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *E-Government* dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ketersediaan jaringan internet, kompetensi sumber daya manusia, koordinasi antar Organisasi Aparatur Daerah (ROO), dan fasilitas serta infrastruktur pendukung. Peningkatan aspek-aspek ini dianggap penting untuk meningkatkan kualitas administrasi *E-Government*.

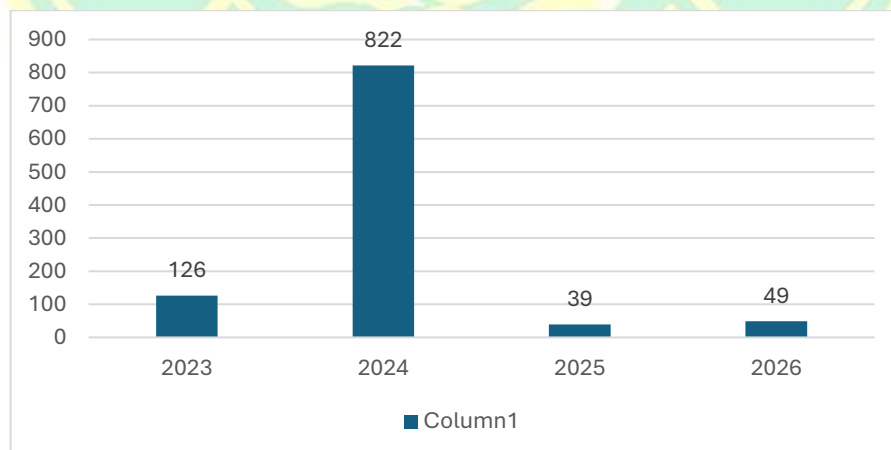
Meskipun kedua studi tersebut telah memberikan gambaran umum tentang berbagai hambatan dalam implementasi *E-Government* dan SIKS-NG, masih ada ruang untuk studi yang lebih mendalam tentang implementasi SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi SIKS-NG berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. studi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat

implementasi aplikasi dan hubungannya dengan implementasi tata kelola di Pelayanan Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan, aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Berikutnya (SIKS-NG) diperkenalkan pada tahun 2019. Proses sosialisasi dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan melalui fasilitator di setiap kecamatan dan pemerintah desa sebagai langkah awal dalam implementasi aplikasi. Selanjutnya, setiap desa menunjuk seorang operator untuk mengelola SIKS-NG di wilayah masing-masing. Operator desa berperan dalam mengumpulkan dan memasukkan data masyarakat miskin dan kurang mampu ke dalam aplikasi SIKS-NG. Data yang dimasukkan kemudian dikirim ke Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan untuk verifikasi dan validasi sebelum digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial.

Melalui implementasi aplikasi SIKS-NG, pemerintah berupaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mendukung program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih memerlukan beberapa perbaikan, termasuk dalam implementasi dan pengelolaan aplikasi SIKS-NG sebagai alat pendukung kebijakan kesejahteraan sosial. (Andriani et al., 2023).

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan secara khusus masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik, (2022), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam tiga tahun terakhir belum menunjukkan penurunan yang berarti, yakni sebesar 31,83 ribu jiwa pada tahun 2022, meningkat menjadi 31,89 ribu jiwa pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 masih tercatat sebesar 31,80 ribu BPS, (2024) Data tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan cenderung stagnan selama tiga tahun berturut-turut dan belum mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi ini menjadi latar belakang penting yang mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial, salah satunya melalui penerapan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai instrumen berbasis teknologi dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang berubah nama menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).



Gambar 1. 1 Data Gagal Verifikasi Rekening 11 Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Selatan

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan diagram batang pada Tabel 1.1 data gagal verifikasi rekening pada 11 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan tren yang berfluktuasi setiap tahun pada periode 2023–2026. Data tersebut memperlihatkan bahwa jumlah kasus gagal verifikasi rekening masih tergolong cukup tinggi dan belum mengalami penurunan yang signifikan. Setiap kecamatan memiliki jumlah kasus yang berbeda, sehingga perbedaan tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan dalam kualitas pengelolaan dan validasi data di tingkat wilayah. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman operator desa, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses verifikasi data. Selain itu, ketidaksesuaian data seperti kesalahan identitas penerima, ketidaktepatan nomor rekening, dan belum terintegrasinya data antar instansi turut menyebabkan tingginya angka gagal verifikasi. Dampak dari permasalahan tersebut adalah terhambatnya proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima. Oleh karena itu, data gagal verifikasi rekening ini menunjukkan bahwa pelaksanaan verifikasi dan validasi dalam aplikasi SIKS-NG belum berjalan secara optimal, sehingga perlu dilakukan perbaikan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem verifikasi, dan integrasi data antar lembaga agar ketepatan sasaran bantuan sosial dapat tercapai.

Penelitian ini dilakukan karena implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* Generasi Berikutnya (SIKS-NG) Di Dinas Pelayanan Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan masih menghadapi beberapa tantangan. Situasi ini

perlu diteliti untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang implementasi aplikasi dalam mendukung pengelolaan Sistem Data Sosial Ekonomi Unik Nasional (DTSEN). Analisis penelitian berfokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Melalui studi ini, diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung dan menghambat implementasi aplikasi SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penelitian ini juga relevan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial berbasis teknologi digital. Diharapkan penggunaan aplikasi SIKS-NG akan mendukung proses pengajuan, verifikasi, validasi, dan pembaruan data kesejahteraan sosial secara lebih terorganisir, akurat, dan berkelanjutan. Data berkualitas merupakan dasar penting untuk menentukan penerima bantuan sosial, sehingga memastikan distribusi yang lebih tepat sasaran.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Dinas Pelayanan Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meningkatkan implementasi aplikasi SIKS-NG, terutama pada aspek-aspek yang masih perlu diperkuat. Lebih jauh lagi, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan peningkatan kualitas manajemen DTSEN, sehingga pelayanan sosial dapat diberikan secara lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Aplikasi SIKS-NG Dalam Layanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Di Kabupaten Bengkulu Selatan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Aplikasi SIKS-NG Dalam Layanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Di Kabupaten Bengkulu Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah khazanah pengetahuan dalam bidang Administrasi Publik terkait implementasi e-government, khususnya pada sektor kesejahteraan sosial.

- a. Pengembangan sistem digital untuk pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, serta pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Memberikan masukan strategis dalam meningkatkan kualitas implementasi aplikasi SIKS-NG, terutama dalam hal verifikasi data, peningkatan SDM, dan optimalisasi fasilitas pendukung serta juga sebagai literatur Bagi Pemerintah Daerah

Pengembangan sistem digital untuk pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

- a. Bagi Pemerintah Desa Memberikan gambaran mengenai kendala pendataan masyarakat dan pentingnya keterlibatan aktif dalam validasi data untuk memastikan ketepatan sasaran program bantuan sosial.

